



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, lahir di Kekaik pada 12 April 1993 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA MATARAM. Dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat pada Kantor Kuasa Hukumnya Lale Suryana Lendra Lestari, S.H., Suhendra Haryadi, S.Sy., dan Hendro Purba, S.H., ketiganya Advokat / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Untuk Keadilan (PADI) Mataram, beralamat di Jalan Angklung Raya, No.01, Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Ampenan pada tanggal 10 Mei 1991 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KOTA MATARAM. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2018, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.352/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dengan Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 7 Juni 2018, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan sesuai dengan tata cara Agama Islam, pada hari Jum'at, tanggal 15 Agustus 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor : 769/22/VIII/2014, tanggal 09 Agustus 2014.
2. Bahwa, setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Lingkungan Banjar, RT.003/033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dalam keadaan rukun dan harmonis, sampai pada bulan Januari 2017, kemudian penggugat pindah dan tinggal di alamat penggugat sekarang.
3. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang diberi nama : Nagita Amara Syakira, lahir di Banjar, Mataram pada tanggal 04 Mei 2015 (umur 3 tahun);
4. Bahwa, sejak pertengahan bulan Juli 2016, keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah disebabkan, antara lain:
 - a. Tergugat sering pulang larut malam;
 - b. Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, bahkan oernah dilakukan di depan anak.
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada pertengahan bulan Januari 2017, menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tidur, selama 2 (dua) bulan, kemudian berpisah tempat tinggal sampai pada bulan Desember 2017, tergugat menjatuhkan talak sesuai tata cara Agama Islam kepada penggugat, sejak itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi.
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat terwujud lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Mataram.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan akan diputus dengan acara verstek.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, untuk mengajukan alat-alat bukti, yang dimanfaatkan oleh penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 26/KJ/VI/2018, atas nama Hema Malini (penggugat), yang dikeluarkan oleh Lurah Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, pada tanggal tanggal 07 Juni 2018, setelah diperiksa, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 769/22/VIII/2014, atas nama Sugiantono dengan Hema Malini (tergugat dengan penggugat) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada tanggal 09 Agustus 2014, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2.

B. Bukti saksi :

Saksi pertama penggugat : SAKS1 1, di bawah sumpah telah menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa, saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama di rumah bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak bulan Januari 2017, penggugat dengan tergugat mulai ada masalah di dalam rumah tangganya.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat mulai bertengkar karena tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain, sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan sering memukul penggugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, bahwa penggugat dengan tergugat pada pertengahan bulan Januari 2017 pernah berpisah tempat tidur kurang lebih 2 (dua) bulan.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan itu, maka pada pertengahan bulan Desember 2017, tergugat kemudian menjatuhkan talak sesuai tata cara Agama Islam kepada penggugat, sejak itu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa, saksi sebagai tante penggugat, pernah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua penggugat : SAKS1 2, di bawah sumpah telah menerangkan:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah sepupu penggugat.
- Bahwa, saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama di rumah bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak pertengahan bulan Januari 2017, penggugat dengan tergugat mulai ada masalah di dalam rumah tangganya.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab penggugat dengan tergugat bertengkar karena tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain dan meminta izin kepada penggugat untuk menikahi perempuan tersebut, namun penggugat tidak mengizinkan, juga tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan sering memukul penggugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, bahwa penggugat dengan tergugat pada pertengahan bulan Januari 2017 pernah berpisah tempat tidur kurang lebih 2 (dua) bulan.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak bulan Maret 2017 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, dan pada pertengahan bulan Desember 2017, tergugat kemudian menjatuhkan talak sesuai tata cara Agama Islam kepada penggugat, sejak itu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa, saksi sebagai sepupu penggugat, pernah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya, bahwa apa yang telah penggugat kemukakan, mulai dari surat gugatan, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, semuanya benar, selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa : penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada tanggal 15 Agustus 2014, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan; antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain : karena tergugat sering pulang larut malam, tidak memperdulikan keluarga, ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan sering memukul penggugat, serta telah menjatuhkan talak sesuai tata cara Agama Islam, pada pertengahan bulan Desember 2017, menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat tersebut, majelis hakim telah dapat menentukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2, yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di Mataram, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, dengan demikian majelis hakim telah dapat berpendapat bahwa penggugat telah benar dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Mataram untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama penggugat dengan tergugat, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.1 dan P.2. majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, serta telah hidup dalam suatu keluarga, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, telah menerangkan bahwa : penggugat dan tergugat adalah benar sebagai suami isteri terhitung sejak bulan Agustus 2014, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan; penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tidur selama 2 (dua) bulan, kemudian berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan pada pertengahan bulan Desember 2017, tergugat telah menjatuhkan talak sesuai tata cara Agama Islam kepada penggugat, penyebabnya karena tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain, kemudian tergugat meminta izin kepada penggugat untuk menikahi perempuan tersebut, namun penggugat tidak mengizinkan karena tidak mau dimadu, serta tergugat sering memukul penggugat.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat dan tergugat, bukti surat P.1 dan P.2, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dibenarkan oleh penggugat serta tidak dibantah oleh tergugat, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dibina lagi karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, menjadi sebab sejak pertengahan bulan Desember 2017, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga



antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat telah berkeras untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan perkara ini berlangsung, telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan perkawinan (rumah tangga)nya; telah didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat yang dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Desember 2017 lalu, maka majelis hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut harus dipahami sebagai terjadinya pertengkaran yang sifatnya sudah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa berdasar fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak pertengahan tahun 2013, penggugat dengan tergugat telah tidak berhubungan sebagai suami isteri lagi, yang hingga saat ini sudah mencapai \pm 8 (delapan) bulan, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, telah terpenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dinyatakan dikabulkan.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada penggugat, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah Talak kesatu Ba'in Shughra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu satu ba'in shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah 1439 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh H. Zabidi, S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Kartini.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Zabidi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Proses Rp. 30.000,00

- ATK Perkara Rp. 50.000,00

- Panggilan Rp. 195.000,00

- R e d a k s i Rp. 5.000,00

- Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)